

Peran Kolaborasi PGNU dengan Kementerian Agama dalam Membentuk Lingkungan Belajar Multikultural yang Inklusif

Ruslan¹, Fery Yanto², Maskuri³

^{1,2,3} Multikultural, Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang
65144 Jawa Timur, Indonesia

^{1*} ruslanhasan1972@gmail.com, ² elsambasyazka@gmail.com, ³ masykuri@unisma.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Diterima : 01-03-25
Revisi : 06-04-25
Dipublikasikan : 29-04-25

Kata Kunci:

*Kolaborasi, Pendidikan
Multikultural, Inklusi*

Keywords:

*Kolaboration,
Multicultural Education,
Inclusion*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara PGNU dan Kementerian Agama dalam mendukung pendidikan keberagaman, tantangan dalam implementasi pendidikan multikultural, serta strategi peningkatan sinergi untuk pendidikan inklusif dan toleran. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui kajian pustaka terhadap konsep pendidikan multikultural, nilai-nilai Islam, dan peran guru dalam membentuk kesadaran keberagaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi terwujud melalui pelatihan guru dalam keterampilan multikultural, penciptaan ruang belajar yang aman, serta integrasi nilai multikultural dalam kurikulum. Tantangan utama meliputi resistensi budaya, keterbatasan sumber daya, dan keselarasan kebijakan dengan nilai lokal. Strategi yang diusulkan mencakup penguatan dialog antara PGNU dan Kementerian Agama, peningkatan kapasitas pendidik, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran inklusif. Dengan strategi yang tepat, pendidikan berbasis nilai Islam dan keberagaman dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Abstract

This study examines the collaboration between PGNU and the Ministry of Religious Affairs in supporting diversity education, challenges in implementing multicultural education, and strategies to increase synergy for inclusive and tolerant education. Using descriptive qualitative methods, data were collected through a literature review of the concept of multicultural education, Islamic values, and the role of teachers in shaping diversity awareness. The results showed that collaboration was realized through teacher training in multicultural skills, the creation of safe learning spaces, and the integration of multicultural values into the curriculum. The main challenges include cultural resistance, limited resources, and policy alignment with local values. The proposed strategies include strengthening dialogue between PGNU and the Ministry of Religious Affairs, increasing the capacity of educators, and utilizing technology in inclusive learning. With the right strategy, education based on Islamic values and diversity can be realized more effectively.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, ras, dan agama. Kemajemukan ini merupakan tantangan sekaligus kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Salah satu aspek penting dalam menjaga kerukunan di tengah keragaman tersebut adalah pendidikan agama Islam yang harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat multikultural.

Pendidikan di Indonesia, sebagai suatu sistem yang terus berkembang, semakin mengakui kepentingan pendidikan multikultural sebagai landasan yang krusial. Keberagaman budaya, etnis, dan agama yang kaya di Indonesia menciptakan lanskap pendidikan yang unik, menuntut pendekatan yang inklusif dan responsif.

Dalam konteks ini, peran guru menjadi sangat signifikan dalam membentuk lingkungan belajar yang mencerminkan keberagaman tersebut. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengulas Peran Kolaborasi Guru Nahdatul Ulama dengan Kementrian Agama dalam membentuk lingkungan belajar multikultural yang inklusif.

Pentingnya pendidikan multikultural diakui sebagai respons terhadap perubahansosial dan globalisasi Tilaar (2004). Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk memiliki tantangan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menciptakan kader yang cerdas secara akademis tetapi juga pribadi yang mampu menghargai keberagaman. Dalam konteks ini, peran guru memiliki dampak besar dalam membentuk landasan karakteristik ini pada peserta Didiknya, Kusumaningrum (2014:198).

Dalam merinci pendekatan ini, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu menciptakan ruang inklusif Andajani.K (2022). Sebagai pendukung utama di kelas, guru memiliki peluang untuk membentuk sikap dan pemahaman siswa terhadap keberagaman budaya.

Oleh karena itu, artikel ini akan melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana Peran Kolaborasi Guru Nahdatu Ulama Dengan Kementrian Agama dapat memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum dan mendukung pembelajaran yang inklusif.

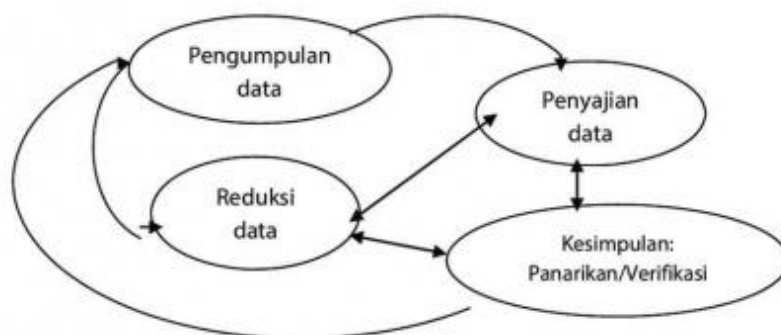
Pentingnya latar belakang ini adalah untuk menyadarkan pembaca akan kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi peran guru Nahdatul Ulama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengakomodasi perbedaan. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat memahami bahwa peran guru tidak hanya berdampak pada perkembangan akademis, tetapi juga membentuk karakter siswa untuk menjadi individu yang terbuka, toleran, dan menghargai keanekaragaman Zaenuri dan Siti Fatonah (2022:181–190).

Penting juga untuk menyadari bahwa lingkungan belajar yang inklusif bukan hanya tanggung jawab guru semata, tetapi juga merupakan hasil dari kolaborasi antara guru, siswa, dan pihak terkait Kholid dan Masduki Asbari (2023), 36–43. Artikel Ini akan menjelajahi berbagai strategi dan praktik yang dapat diterapkan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang multikultural dan inklusif, merangkul keberagaman sebagai kekuatan dan aset, bukan sebagai tantangan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pandangan mendalam tentang peran kolaborasi Pendidikan Guru Nahdatul Ulama dengan Kementrian Agama Dalam Membentuk Lingkungan Belajar Multikultural Yang Inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan rasionalisasi mengenai pentingnya pemanfaatan keilmuan kebangsaan dan wawasan multikulturalisme dalam membangun kesadaran nasional. Studi ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber akademik yang relevan untuk memberikan informasi argumentatif dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penelitian ini tidak melibatkan guru-guru berafiliasi Nahdatul Ulama se Kota Pontianak sebanyak 80 orang, tetapi berfokus pada literatur akademik yang membahas pendidikan kebangsaan, multikulturalisme, serta regulasi terkait. Sumber utama yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan wawasan kebangsaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang kredibel, seperti

jurnal ilmiah, buku akademik, serta regulasi hukum. Jurnal ilmiah digunakan sebagai sumber primer karena memiliki tingkat kredibilitas tinggi, sedangkan dokumen hukum dan hasil penelitian lain berfungsi sebagai data sekunder yang mendukung analisis. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992), yang menjelaskan prosesnya sebagai berikut: Adanya reduksi data Penyaringan dan pemilihan data yang relevan dari berbagai sumber literatur, penampilan data penyusunan data dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut, verifikasi pengkajian ulang terhadap informasi yang diperoleh untuk memastikan validitas dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian, dan penarikan kesimpulan Menyusun temuan utama berdasarkan hasil analisis data untuk memberikan rekomendasi dalam konteks pendidikan multikultural dan wawasan kebangsaan.



Gambar 1. Analisis Data Penelitian Menurut Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk kolaborasi antara PGNU dan Kementerian Agama dalam Mendukung Pendidikan Keberagaman

Pendidik NU terlibat dalam pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama tentang pendidikan multikultural. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pendidik tentang konsep multikulturalisme, mengembangkan keterampilan mereka dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inklusif, serta memberikan strategi untuk mengatasi tantangan dalam implementasi pendidikan multikultural.

a. Pelatihan guru dalam keterampilan multikultural

Pelatihan guru dalam keterampilan multikultural membuka pintu menuju pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman siswa. Salah satu aspek penting dari pelatihan ini adalah pengembangan komunikasi lintas budaya Zahrika (2023:163). Dimana guru belajar untuk berinteraksi dengan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda secara lebih efektif. Keterampilan ini tidak hanya mencakup bahasa verbal, tetapi juga pemahaman akan norma-norma budaya yang memengaruhi interaksi dan pembelajaran di kelas Henny Sanulita (2019: 286). Dengan demikian, guru dapat menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa didengar dan dihargai.

Pemahaman budaya juga menjadi fokus utama dalam pelatihan keterampilan multikultural bagi guru. Guru perlu memahami kompleksitas dan keunikan setiap budaya yang ada di kelas mereka, sehingga dapat merancang pembelajaran yang lebih relevan dan menarik bagi siswa, Nicholas Bloom and John Van Reenen (2013). Pelatihan ini juga melibatkan pengenalan terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik budaya yang dapat memengaruhi proses pembelajaran siswa. Dengan pemahaman budaya yang lebih dalam, guru dapat membimbing siswa untuk menghargai keberagaman sebagai suatu kekayaan.

Respons yang memadai terhadap kebutuhan siswa beragam menjadi aspek kritis lainnya dalam pelatihan keterampilan multicultural Nicholas Bloom and John Van Reenen (2013). Guru perlu dilatih untuk mengidentifikasi dan merespons secara efektif terhadap perbedaan-perbedaan individual, termasuk gaya belajar, kebutuhan akademis, dan aspek-aspek lain yang memengaruhi pengalaman belajar siswa Nicholas Bloom and John Van Reenen (2013). Dengan demikian, pelatihan ini memberikan landasan bagi guru untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, memastikan bahwa setiap siswa dapat meraih potensinya dengan dukungan yang sesuai.

Dengan memahami dan melibatkan diri secara aktif dalam peran-peran ini, guru dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang multikultural dan inklusif. Guru berperan dalam membentuk

generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga terbuka, toleran, dan menghargai keanekaragaman di masyarakat.

b. Menciptakan ruang belajar yang aman

Menciptakan ruang belajar yang aman dan mendukung merupakan peran guru untuk membentuk lingkungan pendidikan yang positif. Fokus utama dalam penciptaan atmosfer yang aman ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik ruang kelas, melainkan juga melibatkan dimensi sosial dan emosional. Sebuah ruang kelas yang aman memberikan kebebasan kepada siswa untuk berbicara, berekspresi, dan mengajukan pertanyaan tanpa rasa takut dicemooh atau dihakimi.

Penting bagi guru untuk memastikan penerapan aturan dan norma yang berorientasi pada kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman Anif Istianah (2023). Aturan ini tidak hanya menciptakan struktur yang jelas dalam kelas, tetapi juga mengukuhkan bahwa setiap siswa diperlakukan dengan adil dan setara. Dengan adanya norma-norma ini, interaksi positif antar-siswa dapat terjaga, konflik dapat diminimalkan, dan rasa kepercayaan di dalam kelas dapat tumbuh.

Selain itu, atmosfer yang mendukung juga mencakup peran guru dalam membimbing siswa dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang positif Aulia Rizki (2023:230). Responsivitas guru terhadap berbagai kebutuhan siswa, baik secara akademis maupun emosional, menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu dihargai dan merasa diterima. Dengan begitu, guru bukan hanya menjadi penyampai materi pelajaran, tetapi juga arsitek lingkungan belajar yang memfasilitasi pertumbuhan, pemahaman, dan penghargaan terhadap keberagaman, menciptakan fondasi yang kokoh bagi perkembangan siswa secara menyeluruh.

c. Pengintegrasian Nilai-Nilai Multikultural dalam Kurikulum

Pengintegrasian nilai-nilai multikultural dalam kurikulum menjadi peran kunci bagi guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang kaya dan inklusif. Pemilihan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya menjadi langkah awal, di mana guru dengan cermat memilih sumber daya seperti buku teks, artikel, video, dan lainnya yang memperlihatkan keberagaman etnis, agama, dan

latar belakang sosial siswa. Tujuan utamanya adalah membentuk pemahaman yang mendalam mengenai keanekaragaman yang ada di sekitar mereka.

Dalam kurikulum, pengajaran nilai-nilai demokratis menjadi aspek yang tak terpisahkan. Guru mengintegrasikan konsep-konsep demokratis seperti kebebasan, persamaan, dan keadilan dengan contoh konkret dari berbagai budaya. Melalui pendekatan ini, siswa dapat memahami bahwa nilai-nilai tersebut bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai konteks masyarakat, merangkul persamaan dalam perbedaan. Selanjutnya, pengintegrasian nilai-nilai multikultural menekankan penekanan pada keadilan sosial dan hak asasi manusia. Guru memainkan peran kunci dalam membimbing siswa untuk memahami tantangan dan ketidaksetaraan yang mungkin dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Proses ini melibatkan analisis kritis terhadap isu-isu sosial serta memberdayakan siswa sebagai agen perubahan yang mendukung keadilan sosial. Penggunaan sumber daya dengan perspektif beragam juga menjadi strategi efektif. Guru menyajikan materi dari berbagai latar belakang budaya, membantu mengurangi stereotip, dan meningkatkan pemahaman siswa tentang keragaman global. Didukung oleh kegiatan praktis dan pengalaman-pengajaran interaktif, seperti proyek kelompok atau kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, guru menciptakan lingkungan belajar yang merangsang partisipasi aktif siswa. Terakhir, sistem evaluasi yang adil dan inklusif mencerminkan komitmen guru terhadap nilai-nilai multikultural.

Dengan mengembangkan metode evaluasi yang memperhitungkan berbagai cara siswa mengekspresikan pemahaman mereka, guru menegaskan penghargaan terhadap keragaman latar belakang siswa. Melalui langkah-langkah ini, guru tidak hanya membentuk lingkungan belajar yang inklusif, tetapi juga mendorong pemahaman mendalam tentang nilai-nilai universal yang melingkupi perbedaan. Inilah dasar menuju pendidikan yang merangsang perkembangan siswa sebagai individu yang terbuka, toleran, dan berkomitmen pada keadilan sosial.

d. Tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Lingkungan Pendidikan

Tantangan yang dihadapi pendidik NU dalam membangun lingkungan belajar multikultural yang inklusif berkaitan erat dengan kebijakan pendidikan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. NU sebagai organisasi Islam tradisional memiliki pendekatan pendidikan yang khas, terutama di pesantren dan madrasah, yang sering kali berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satu tantangan utama adalah menyelaraskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan konsep multikulturalisme yang menekankan keberagaman dan inklusivitas (Sukadari, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tarnoto (2016) Di beberapa lingkungan pendidikan NU, pendidikan berbasis kitab kuning dan metode pengajaran tradisional masih sangat dominan. Integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum sering kali dianggap sebagai sesuatu yang perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang dianut. Selain itu, tidak semua tenaga pendidik memiliki pemahaman yang mendalam tentang pendidikan multikultural, sehingga diperlukan pelatihan khusus agar mereka dapat mengajarkan nilai-nilai keberagaman dengan cara yang tetap relevan dengan tradisi keislaman. Temuan yang hampir serupa juga dijabarkan oleh penelitian yang dilakukan Zakiah dkk (2021) di mana kendala atau tantangan yang muncul dalam pelaksanaan Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan dalam penerimaan masyarakat terhadap konsep multikulturalisme. Di beberapa daerah, keberagaman budaya dan agama masih menjadi isu yang sensitif, sehingga upaya membangun lingkungan belajar yang inklusif menghadapi hambatan sosial. Prasangka dan stereotip terhadap kelompok lain masih sering muncul, yang membuat implementasi pendidikan multikultural menjadi lebih sulit. Selain itu, infrastruktur pendidikan di lingkungan NU masih terbatas, sehingga dukungan dari Kementerian Agama dalam bentuk kebijakan afirmatif sangat diperlukan agar pendidikan multikultural dapat berjalan lebih efektif. (Muhibbin & Hendriani, 2021).

Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan multikultural dari Kementerian Agama juga tidak selalu sejalan dengan kondisi nyata di madrasah dan pesantren NU. Beberapa program yang dicanangkan pemerintah terkadang kurang fleksibel dalam menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang sudah lama diterapkan di

lingkungan NU. Oleh karena itu, dibutuhkan dialog dan kolaborasi yang lebih erat antara NU dan Kementerian Agama agar pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. (Genova, 2015; Sari & Hendriani, 2021).

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, penting bagi pendidik NU untuk diberikan pelatihan yang lebih intensif mengenai pendidikan multikultural, serta pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif agar inklusivitas dapat terwujud tanpa menghilangkan identitas keislaman. Selain itu, dukungan kebijakan yang lebih adaptif dari Kementerian Agama sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan multikultural di lingkungan NU dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan benturan nilai. Dengan kerja sama yang baik antara NU dan Kementerian Agama, lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberagaman dapat terbentuk, sehingga mampu melahirkan generasi yang lebih toleran dan menghargai perbedaan. (Sari & Hendriani, 2021).

Tantangan yang dihadapi pendidik NU dalam membangun lingkungan belajar multikultural yang inklusif berhubungan erat dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Kementerian Agama. NU, sebagai organisasi berbasis Islam tradisional, memiliki pendekatan tersendiri dalam pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Ahlulsunna wal Jamaah. Sementara itu, Kementerian Agama memiliki kebijakan yang lebih universal dalam menerapkan pendidikan multikultural. Perbedaan perspektif ini sering kali menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai keislaman dengan konsep keberagaman yang lebih luas. (Bhatnagar & Das, 2014; Genova, 2015; Sari & Hendriani, 2021).

Di lingkungan pendidikan NU, baik di pesantren maupun madrasah, pendidikan masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang kuat. Integrasi pendidikan multikultural harus dilakukan dengan tetap menjaga identitas keislaman tanpa mengabaikan keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Tantangan yang muncul di antaranya adalah bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai multikulturalisme dapat diterima tanpa menimbulkan benturan dengan ajaran agama yang telah lama diajarkan di lingkungan NU. Selain itu, di beberapa daerah, masih terdapat tantangan kultural di mana keberagaman belum sepenuhnya diterima,

sehingga penerapan pendidikan multikultural menghadapi resistensi (Abongdia et al., 2015). Kesiapan tenaga pendidik NU dalam memahami dan mengajarkan pendidikan multikultural juga menjadi persoalan tersendiri. Tidak semua pendidik memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep ini, dan pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Agama terkadang kurang sesuai dengan kondisi sosial-budaya di lingkungan pesantren dan madrasah NU. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam menyediakan pelatihan yang sesuai agar guru dan kyai mampu mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme dengan tetap menghormati ajaran Islam yang mereka anut.

Selain itu, integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum juga menjadi tantangan. NU memiliki sistem pendidikan yang berbasis pesantren dengan kitab kuning sebagai sumber utama pembelajaran, sementara Kementerian Agama mendorong penerapan pendidikan multikultural melalui program pendidikan formal. Keselarasan antara dua pendekatan ini masih membutuhkan strategi yang tepat agar nilai-nilai keberagaman dapat masuk tanpa menghilangkan kekhasan pendidikan NU (Kustawan, 2016).

Dari sisi infrastruktur dan kebijakan, masih ada keterbatasan dalam mendukung pembelajaran berbasis multikulturalisme di lingkungan NU. Dukungan dari Kementerian Agama dalam bentuk kebijakan yang lebih adaptif sangat diperlukan agar pendidikan multikultural dapat diterapkan dengan lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara NU dan Kementerian Agama perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar inklusif, di mana nilai-nilai keberagaman dapat diajarkan tanpa menghilangkan jati diri Islam yang menjadi ciri khas pendidikan NU.

e. Strategi untuk Meningkatkan Sinergi antara PGNU dan Kementerian Agama dalam Mendukung Pendidikan Inklusif dan Toleran

Strategi untuk meningkatkan sinergi antara Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PGNU) dan Kementerian Agama dalam mendukung pendidikan inklusif dan toleran dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan kebijakan, pelatihan, kurikulum, serta kolaborasi antar lembaga.

Salah satu strategi utama adalah memperkuat dialog dan koordinasi antara PGNU dan Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis inklusivitas dan toleransi. Melalui forum diskusi rutin, kedua pihak dapat menyelaraskan visi dan misi dalam menerapkan pendidikan multikultural yang tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh NU (Arifin, 2020).

Peningkatan kapasitas pendidik menjadi langkah penting berikutnya. Pelatihan dan workshop bagi guru NU tentang pendidikan inklusif dan toleran perlu diadakan secara berkala dengan dukungan dari Kementerian Agama. Program ini harus mencakup metode pembelajaran yang mendukung keberagaman, teknik pengelolaan kelas yang menghargai perbedaan, serta penerapan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan sehari-hari (Munawar, 2021).

Integrasi nilai-nilai multikulturalisme dalam kurikulum juga menjadi bagian dari strategi ini. Kurikulum yang digunakan di madrasah dan pesantren NU perlu dikembangkan dengan menambahkan materi yang memperkenalkan konsep keberagaman budaya, agama, dan sosial di Indonesia. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami pentingnya toleransi sejak dini tanpa merasa bertentangan dengan ajaran agama mereka. (Harianto, 2022). Selain itu, sinergi dapat diperkuat melalui program pertukaran pengalaman dan kolaborasi antar sekolah dan pesantren. PGNU dan Kementerian Agama dapat mendorong kegiatan studi banding atau proyek kolaboratif antara madrasah dan sekolah umum untuk membangun pemahaman bersama tentang pendidikan inklusif. Melalui interaksi langsung, siswa dan guru dari berbagai latar belakang dapat belajar bagaimana menghadapi keberagaman dengan sikap terbuka dan menghormati perbedaan. (Nugroho, 2023). Dukungan infrastruktur dan teknologi juga perlu diperhatikan. Pengembangan media pembelajaran berbasis digital yang menampilkan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi dapat menjadi alat bantu bagi guru dalam mengajar. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan PGNU untuk menciptakan modul digital, video edukatif, serta platform daring yang dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. (Bakri & Mukhlis, 2023). Terakhir, evaluasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-

benar efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan toleran. PGNU dan Kementerian Agama dapat membentuk tim khusus yang bertugas mengevaluasi program yang sudah berjalan, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. (Bakri & Mukhlis, 2023). Dengan adanya strategi-strategi ini, sinergi antara PGNU dan Kementerian Agama dapat semakin kuat dalam mendukung pendidikan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga berlandaskan nilai-nilai inklusif dan toleran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abongdia, J. A., Foncha, J. W., & Dakada, A. (2015). Challenges encountered by teachers in identifying learners with learning barriers: Toward inclusive education. *International Journal of Educational Sciences*, 8(3), 493–501. <https://doi.org/10.1080/09751122.2015.11890271>
- Ainul Yakin, M. 2005. Pendidikan Multicultural, Cross-cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media
- Alzanaa, A. W., & Harmawati, Y. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 51-57.
- Arifin, A. (2020). Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif dan Tantangan. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 16(1), 1–14.
- Bakri, S., & Mukhlis, A. (2023). Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang Mempromosikan Nilai-Nilai Moderat dan Anti-Kekerasan. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 19(2), 67–82.
- Bhatnagar, N., & Das, A. (2014). Regular school teachers' concerns and perceived barriers to implement inclusive education in New Delhi, India. *International Journal of Instruction*, 7(2), 89–102. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085257.pdf>
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen, No Title No Title No Title, NBER Working Papers, 2013 <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Danurahman1a, J., Prasetyo2b, D., & Hermawan3c, H. (2021). Kajian Pendidikan Multikultural Di Era Digital.
- Duanto, Y. B., Meida, E. F., Saputri, R. M., Ediansyah, P., & Febriana, B. (2022). Pendidikan Multikultural Berlandaskan Pancasila dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika. *TSAQOFAH*, 2(2), 226-235.

- Genova, A. (2015). Barriers to inclusive education in Greece, Spain and Lithuania: Results from emancipatory disability research. *Disability & Society*, 30(7), 1042–1054. <https://doi.org/10.1080/09687599.2015.1075867>
- H A R Tilaar, 'Dalam Merespon Tantangan Globalisasi', 2004.
- Hariato, H. (2022). Metode Pembelajaran Partisipatif dalam Pendidikan Agama Islam untuk Membangun Pemahaman Lintas Budaya. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 18(1), 45–60.
- Ibrahim, R. (2015). Pendidikan multikultural: pengertian, prinsip, dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam. *Addin*, 7(1).
- Istianah, Anif, Bunyamin Maftuh, and Elly Malihah, 'Konsep Sekolah Damai: Harmonisasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar', *Jurnal Education*.
- Iswanto, I. (2022). Evaluasi dan Penyesuaian Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Masyarakat Multikultural. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18(2), 77–92.
- Kudubakti Andajani, 'Modul Pembelajaran Berdiferensiasi', Mata Kuliah Inti Seminar Pendidikan Profesi Guru, 2 (2022).
- Kustawan, D. (2016). Pendidikan inklusif dan upaya implementasinya. Jakarta: PT. Luxima Metro Media.
- Muhibbin, M., & Hendriani, W. (2021). Tantangan dan strategi pendidikan inklusi di perguruan tinggi di Indonesia: Literature review. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 4(2). 92–102. <http://dx.doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p92-102>
- Munawar, M. (2021). Mempromosikan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Pendidikan Agama Islam untuk Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 27–41
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), 197-210.
- Nugraha, D. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural Di Ndongesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 140-149.
- Nugroho, N. (2023). Literasi Digital dalam Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 8(1), 1–16.
- Puspita, Y. (2018, July). Pentingnya Pendidikan Multikultural. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*.

- Sanulita, Henny, 'Pemanfaatan Pendekatan Pragmatik Dalam Pengajaran Bahasa Berbasis Pemahaman Lintas Budaya', Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS), 1.0 (2019), 286–93
<https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks/article/view/39026>
- Sukadari. (2019). Model pendidikan inklusi dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yogyakarta: Kanwa Publisher
- Sukmawati, W. S., Bahari, B., Degawan, R. H., Zakaria, N., & Marzuki, M. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila Di Era Multikulturalisme. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 2(2), 250-258.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat SD. *HUMANITAS* 13(1), 50-61. <http://dx.doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843>
- Wahyudi, A., & Supriyanto, A. (2021). Kemitraan Antarlembaga Pendidikan dalam Mempromosikan Nilai-Nilai Kerukunan Antaragama. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 17(2), 89–104.
- Yunita Dyah Kusumaningrum, 'Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Pada Peserta Didik Di SMA Al Hikmah Surabaya', *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4.4 (2014), 198.
- Zaenuri and Siti Fatonah, 'Analisis Implementasi Peran Guru Dalam Penanaman Nilai Karakter Toleransi Pada Mata Pelajaran Pkn Di MI Ma'arif Darussalam Plaosan Yogyakarta', *Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah(JURMIA)*,2.1(2022),181–90<<https://doi.org/10.32665/jurmia.v2i1.284>>.
- Zakiah, W., Karsidi, R., & Yusuf, M. (2021). The implementation of inclusive educational policies in elementary school. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 54(1), 130–140. <https://dx.doi.org/10.23887/jpp.v54i1.32210>
- Zahrika, Nazala Aprian, and Universitas Negeri Semarang, 'Kurikulum Berbasis Budaya Untuk Sekolah Dasar : Menyelaraskan Pendidikan Dengan Identitas Lokal', 3.2 (2023), 163–169